



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA BARAT



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
JEMAJA BARAT TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN JEMAJA BARAT

Jl. Usman Matwan Desa Impol Kode Pos 29792

KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA BARAT TAHUN 2025

CAMAT JEMAJA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025, serta efektivitas dalam penyusunan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- Perubahan** b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);
15. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 229 Tahun 2022 Tentang tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA BARAT TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Adapun Tugas Pokok dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut;

- a. Melaksanakan tugas secara penuh dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025;
- c. Menyiapkan Dokumen Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025.

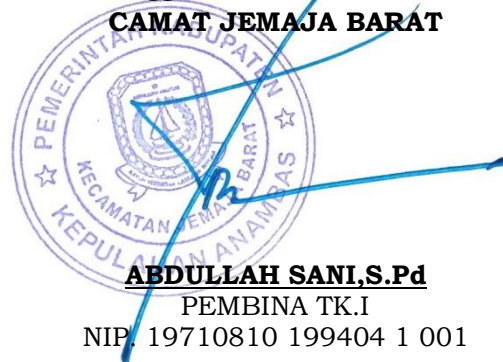
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Impol

Pada tanggal : 10 Maret 2025

CAMAT JEMAJA BARAT



ABDULLAH SANI, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199404 1 001


Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai Laporan);
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunaan sebagaimana mestinya;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA
BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEMAJA BARAT TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | TIM PELAKSANA KEGIATAN |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ABDULLAH SANI, S.Pd NIP. 19601005 201404 1 003 | Plt.CAMAT JEMAJA BARAT | KETUA |
| 2 | MUHAMMAD ARIAS, S.Pi NIP. 19800227 201101 1 002 | Plt.SEKRETARIS CAMAT | ANGGOTA |
| 3 | RITA HAYATI, S.I.P NIP.19840710 201001 2 018 | KASUBBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN | ANGGOTA |
| 4 | SYAKBAN NIP.19800227 201101 1 002 | Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ANGGOTA |
| 5 | IQBAL PRATAMA PUTRA, S.P | STAF PENGADMINISTRASI UMUM | ANGGOTA |

CAMAT JEMAJA BARAT

ABDULLAH SANI, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA BARAT
Jl. Usman Matwan Desa Impol Kode Pos 29792

**KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEMAJA BARAT
TAHUN 2025**

CAMAT JEMAJA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Camat Jemaja Barat tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten

Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);
15. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 229 Tahun 2022 Tentang tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN:

PERTAMA : **MENETAPKAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025.**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Impol
Pada tanggal : 10 Maret 2025

CAMAT JEMAJA BARAT



ABDULLAH SANI, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199404 1001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
5. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
6. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) periode tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat tahun 2025-2029 dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025. Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang Program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan pada tahun 2025.

Harapan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Jemaja Barat tahun 2025 dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Jemaja Barat dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kabupaten kepulauan anambas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan RPJMD Kabupaten kepulauan Anambas tahun 2025-2029

Impol : 10 Maret 2025
CAMAT JEMAJA BARAT

ABDULLAH SANI,S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199404 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU APBD BERJALAN..... | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan..... | 18 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 20 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD..... | 25 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 31 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 31 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 32 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 33 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 ... | 38 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 43 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu.
- Tabel 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.3 : Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- Tabel 2.4 : Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
- Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
- Tabel 4.1 : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja setiap tahun yang berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada RKPD Perangkat Daerah masing-masing. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dokumen publik yang merupakan pedoman penyusunan rancangan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan stakeholder sebagai bagian dari perencanaan partisipatif. Dengan pertimbangan tersebut, rancangan

RPJMD akan menghasilkan kajian akademis berupa evaluasi capaian pembangunan, rumusan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penetapan isu strategis pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Di dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus didasarkan pada hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat berpedoman pada:

1.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kerja Kecamatan Jemaja Barat bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana kerja dengan Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.1.2 Hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Jemaja Barat.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kecamatan Jemaja Barat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 juga dirumus untuk menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2025 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir Unsur Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
14. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
15. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat adalah untuk menjamin kesesuaian dokumen rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat diharapkan memudahkan dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga bisa melakukan koreksi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan dan melakukan perubahan terhadap program/kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rancangan Perubahan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jemaja Barat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilan serta penjelasan Program/kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jemaja Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan Jemaja Barat adalah Kecamatan yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Perubahan Kerja Kecamatan Jemaja Barat mengacu pada tahun anggaran 2024 yang telah disahkan dan terhadap capaian Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan 2025 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu Anggaran 324.642.428,00 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%).
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan PeningkatanEfektifitasPemberdayaan diwilayah Kecamatan Pagu Anggaran 237.817.751,00 (Realisasi Keuangan 80%) (Realisasi Fisik 20%)
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pagu Anggaran 103.455.000,00 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pagu Anggaran 6.622.000,00 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)

- Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Pagu Anggaran 0 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)
- 2. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu Anggaran 5.000.000,00 (Realisasi Keuangan 97,67%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD Pagu Anggaran 5.001.000,00 (Realisasi Keuangan 88,10%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Pagu Anggaran 5.090.414,00 (Realisasi Keuangan 48,48%) (Realisasi Fisik 100,00%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pagu Anggaran 5.113.000,00 (Realisasi Keuangan 70,80%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pagu Anggaran 4.965.000,00 (Realisasi Keuangan 45,23%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pagu Anggaran 6.945.000,00 (Realisasi Keuangan 95,69%) (Realisasi Fisik 100,00%)

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu Anggaran 2.196.521.862,00 (Realisasi Keuangan 94,73%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pagu Anggaran 95.400.000,00 (Realisasi Keuangan 85,12%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pagu Anggaran 2.545.000,00 (Realisasi Keuangan 36,58%) (Realisasi Fisik 100,00%).
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pagu Anggaran 3.450.000,00 (Realisasi Keuangan 100,00%) (Realisasi Fisik 100,00%).
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran 2.002.000,00 (Realisasi Keuangan 99,91%) (Realisasi Fisik 100,00%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pagu Anggaran 28.461.538,00 (Realisasi Keuangan 70,08%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu Anggaran 40.468.480,00 (Realisasi Keuangan 99,12%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu Anggaran 5.274.410,00 (Realisasi Keuangan 67,98%) (Realisasi Fisik 100,00%).
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Pagu Anggaran 28.000.000,- (Realisasi Keuangan 86,35%) (Realisasi Fisik 100,00%).
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu Anggaran 220.436.000,00 (Realisasi Keuangan 74,80%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu Anggaran 26.615.216,00 (Realisasi Keuangan 100,00%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu Anggaran 24.371.088,00 (Realisasi Keuangan 72,82%) (Realisasi Fisik 100,00%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu Anggaran 0 (Realisasi Keuangan 40,13%) (Realisasi Fisik 100,00%).

 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu Anggaran 0 (Realisasi Keuangan 98,42%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pagu Anggaran 0 (Realisasi Keuangan 43,48%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Anggaran 10.058.864,00 (Realisasi Keuangan 56,50%)
(Realisasi Fisik 100,00%).
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pagu
Anggaran 237.817.751,00 (Realisasi Keuangan 80,55%)
(Realisasi Fisik 100,00%).
- 3. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
 - Tidak ada Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang
melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja
program/kegiatan;
 1. Efisiensi Anggaran Tahun 2022
 3. Terjadi tunda bayar oleh Pemerintah Pusat terhadap Dana
Bagi Hasil yang menjadi Hak Daerah Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas yang menyebabkan tidak tercapainya Target
Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sehingga mengakibatkan
tertunda pembayaran pada tahun berjalan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, terjadi Ketidak susaian antara Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat pada tahun anggaran 2025.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Anambas dalam **Tabel 2.1** berikut:

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA BARAT

| Kode Rekening | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d (n-3) Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu {n-2} | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD (n-2) Tahun (2021) | Realisasi Renja PD (n-2) Tahun (2021) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7.01. | KECAMATAN | | | | | | 99,73 | | | 71,82 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100,00 | | | 72,62 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 100,00 | | | 72,62 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 75,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 66,67 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 66,67 |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 66,67 |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 66,67 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 |
| 7.01.01.201.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| | | Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 100,00 | 10 Orang | 10 Orang | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 75,00 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 3 Bulan | 66,67 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 9 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 100,00 | 0 Paket | 6 Paket | 66,67 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 15 Paket | 5 Paket | 5 Paket | 5 Paket | 100,00 | 0 Paket | 10 Paket | 66,67 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 15 Paket | 5 Paket | 5 Paket | 5 Paket | 100,00 | 0 Paket | 10 Paket | 66,67 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 0 Laporan | 24 Laporan | 66,67 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 12 Laporan | 36 Laporan | 75,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 0 Laporan | 2 Laporan | 66,67 |

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 bulan | 12 Bulan | 100,00 | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bualan | 12 Bulan | 100,00 | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Pelayanan Surat Menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bualan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 |

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bualan | 12 Bulan | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 Agenda | 3 Agenda | 3 Agenda | 3 Agenda | 100,00 | 3 Agenda | 3 Agenda | 100,00 |
| 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.04.2.01.02 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di | Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Agenda | 1 Agenda | 1 Agenda | 1 Agenda | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Kecamatan | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | |

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|--------|---|---|---|
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Agenda | 1 Agenda | 1 Agenda | 1 Agenda | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Agenda | 1 Agenda | 1 Agenda | 1 Agenda | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

CAMAT JEMAJA BARAT,



ABDULLAH SANI,S.Pd
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19710810 199404 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Jemaja Barat berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Jemaja Barat secara garis besar dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jemaja Barat yaitu :

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Jemaja Barat.
2. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional
3. Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda di wilayah Kecamatan Jemaja Barat.
4. Mewujudkan pengarusutamaan gender di Kecamatan Jemaja Barat.

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Jemaja Barat antara lain :


1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Jemaja Barat.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Jemaja Barat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jemaja Barat.
4. Meningkatnya partisipasi gender di Kecamatan Jemaja Barat.

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Jemaja Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA BARAT

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | CC (51,76) | CC (51,76) | B (60,10) | B (60,10) | CC (51,76) | CC (51,76) | B (60,10) | B (63,00) | Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana dan prasarana yang ada |
| 2 | Indeks Kepuasan layanan Masyarakat | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | B (81,29) | B (81,29) | B (82,00) | A (84,00) | B (81,29) | B (81,29) | B (82,00) | A (84,00) | Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 3 | Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 20% | 20% | 40% | 60% | 20% | 20% | 40% | 60% | Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 4 | Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

CAMAT JEMAJA BARAT,

ABDULLAH SANI, S.Pd
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19710810 199404 1 001

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
 - a. Pelayanan informasi, pelayanan kartu keluarga, pelayanan KTP, pendampingan Dana Desa.
 - b. Memfasilitasi Musrenbang tingkat desa dan kecamatan serta pelayanan rekomendasi perijinan.
 - c. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
 - d. Pelayanan pendistribusian Beras Sejahtera (rastra), memfasilitasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosian (PMKS), Forum Anak, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) penyelenggaraan MTQ/STQ, penanganan bencana alam, pembinaan peranan wanita dan kesejahteraan keluarga serta pembinaan karang taruna dan generasi muda.
2. Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi :
 - a. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap persyaratan administrasi kependudukan, tidak tersedianya Tenaga pendampingan Dana Desa.
 - b. Usulan musrenbang kecamatan dan desa kurang diakomodir oleh instansi terkait dan musrembang kabupaten.
3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan
Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat memenuhi kebutuhan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan pelayanan kurang optimal, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis prioritas yang direncanakan:
 - a. Pelayanan Publik
 - b. Pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga
 - c. Lomba Desa
 - d. Pelaksanaan MTQ / STQ
 - e. Pelaksanaan Musrenbang
 - f. Peningkatan SDM
 - g. Penyaluran Rastra
 - h. Koordinasi instansi terkait dan vertical
 - i. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
 - j. Pembinaan karang taruna
 - k. Pemilihan kepala desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Dalam rangka Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Memperhatikan peraturan yang ada betapa besar kompleksnya Tugas dan Fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan Tugas Fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana Kabupaten Kepulauan Anambas.

Memperhatikan peraturan yang ada betapa besar kompleksnya Tugas dan Fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan Tugas Fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana dan prasarana sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Karang Bintang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktifitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

1. Memamfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok, fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memamfaatkan / menerapkan kemajuan tekhnologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memamfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
6. Memamfaatkan peran swasta untuk melengkapi saran dan prasarana serta menggali potensi sumber daya alam yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memamfaatkan tekhnologi yang canggih.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam Tabel 2.3 berikut


**ISU-ISU DAN PERMASALAHAN PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN JEMAJA BARAT - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

| NO | PERMASALAHAN | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | SOLUSI | SARAN DAN HARAPAN |
|----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kesekretariatan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat | <ol style="list-style-type: none"> UU ASN Adanya moratorium pegawai Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor | <ol style="list-style-type: none"> Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) | <ol style="list-style-type: none"> Distribusi dan Penerimaan ASN sesuai dengan Hasil Analisa Anjab Perangkat Daerah Program Tugas Belajar dan Diklat dan Bimtek Terealisasinya Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun Anggaran 2021 |
| 2 | Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban | <ol style="list-style-type: none"> Kurang sosialisasi Perda perijinan Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat | <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi perda perijinan kepada masyarakat Penempatan Tugas Satpol PP | <ol style="list-style-type: none"> Perda pelimpahan kewenangan perijinan, perda retribusi Penambahan Personil Satpol PP |
| 3 | Pelayanan, Informasi dan Pengaduan | <ol style="list-style-type: none"> Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas | <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Anggaran Pengadaan sarpras pelayanan Publik belum Pelayanan informasi public kepada masyarakat berbasis TIK | <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pengadaan sarpras pelayanan Publik pada tahun 2021 Pelatihan Pengelolaan website pelayanan |
| 4 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas | <ol style="list-style-type: none"> Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan Jemaja Barat | <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha Pelatihan Bagi Pencari Kerja | <ol style="list-style-type: none"> Mebuka Usaha Mandiri berbasis UMKM Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Bidang Rigger, Scabolding dan Operator Alat Berat |
| 5 | Pemberdayaan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan Lemahnya penerapan Swadaya yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa | <ol style="list-style-type: none"> Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Perlu Sosialisasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku | <ol style="list-style-type: none"> Terealisasinya Anggaran Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Peningkatan Monitoring dan Evaluasi oleh Perangkat Daerah DP4MD |
| 6 | Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian | <ol style="list-style-type: none"> Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah kecamatan Jemaja Barat Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar | <ol style="list-style-type: none"> Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa se-kecamatan Jemaja Timur Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis | <ol style="list-style-type: none"> Terealisasinya pembangunan Pasar Rakyat Tipe D di Desa Kecamatan Jemaja Timur |

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|
| 7 | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kejuruan (SMK) 2. Kurangnya minat para siswa lulusan SMP untuk menimba ilmu di sekolah kejuruan (SMK) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja 2. Kurangnya kegiatan ekskool yang menjadi daya Tarik bagi siswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Industri, perikanan dan Pariwisata 2. Pengadaan sarana prasarana di SMKN 3 Anambas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasinya Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Industri, perikanan dan Pariwisata Tahun 2021 2. Terealisasinya sarana olahraga, kesenian, dll di SMKN 3 Anambas |
| 8 | Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Palayanan kesehatan masih rendah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2. Kurangnya Saprass Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendistribusikan Tegana medis sesuai kebutuhan 2. Pengadaan Saprass Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Kebutuhan Tenaga Medis sesuai dengan kebutuhan |
| 9 | Perikanan, Pertanian Dan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan 2. Lemahnya Pengawasan DKP 3. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage 2. Adanya gangguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing 3. Belum optimalnya Desa Swasembada Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagunan Pabrik Es 2. Pembangunan Pasar Ikan Bersih 3. Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasinya Pembagunan Pabrik Es 2. Pembangunan Sarana Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) Pengelolaan Hasil Laut 3. Terealisasinya Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan 4. Terealisasinya Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Desa sunggak |
| 10 | Perencanaan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Kemampuan Anggaran Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya hasil keputusan musrenbang yang menjadi skala prioritas pembangunan |
| 11 | Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Ruas Jalan masih rendah 2. ketersediaan Air Minum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi ruas jalan di Jemaja Barat 2. Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah 2. Peningkatan Pembangunan SPAM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala di ruas jalan kec. Jemaja Timur 2. Terlaksananya Peningkatan Pembangunan SPAM (Konektivity jaringan distribusi + SR) |
| 12 | Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan 2. Persampahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur dikawasan mangrove | <ol style="list-style-type: none"> 1. perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Jemaja Barat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya tidakan tegas terhadap pembangunan yang dilakukan dikawasan konservasi 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Jemaja Barat |

CAMAT JEMAJA BARAT,



ABDULLAH SANI,S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199404 1 001

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD Tahun 2023 yang terdiri dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada, dengan mensinkronisasikan antara Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan RKPD Tahun 2025 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam Tabel 2.4 berikut :

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA BARAT

| No | Rancangan RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | Catatan Penting | |
|----------|--|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|--|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | 2.762.016.708 | | | | 2.762.016.708 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 2.762.016.708 | | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 2.762.016.708 | | |
| A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 38.014.414 | | Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 28.014.414 | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 5.000.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 5.000.000 | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | 5.001.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | 5.001.000 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.090.414 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.090.414 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Koordinasi penyusunan DPA Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.113.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.113.000 | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 1 Dokumen | 4.965.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 1 Dokumen | 4.965.000 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 5.900.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 5.900.000 | | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 6.945.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 6.945.000 | | |

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.912.078.237 | | Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.698.212.766 | |
|----------|--|--------------------------------------|--|------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------|----------------------|--|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang | 2.295.846.862 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang | 2.295.846.862 | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 95.400.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 95.400.000 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 2.545.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 2.545.000 | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ triwulan semesteran skpd | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan triwulan semesteran Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.380.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan triwulan semesteran Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.380.000 | |
| C | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 223.691.039 | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 223.691.036 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor | 1 Paket | 2.002.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor | 1 Paket | 2.002.000 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 28.461.538 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 28.461.538 | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 40.468.480 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 40.468.480 | |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5.274.410 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5.274.410 | |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 28.000.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 28.000.000 | |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 220.436.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 220.436.000 | |
| D | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 32.625.865 | | Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 32.625.865 | |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 51.991.747 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 51.991.747 | |
| E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 426.398.832 | | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 426.398.832 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat | Kab. Kepulauan | Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan | 24.371.088 | Kab. | Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan | 24.371.088 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------|--------------------|--|
| | Menyurat | Anambas, Jemaja Barat | Jasa Surat Menyurat | | | Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jasa Surat Menyurat | | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0 | |
| 3 | Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | 2 Dokumen | 0 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | 2 Dokumen | 0 | |
| F | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 6.456.506 | | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 6.456.500 | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | 10.058.864 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | 10.058.864 | |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 18.151.580 | | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 18.151.580 | |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 1.235.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 1.235.000 | |
| 2 | Penatausahaan Barang milik daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan Penatausahaan barang Milik Daerah | 4 Dokumen | 1.380.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan Penatausahaan barang Milik Daerah | 4 Dokumen | 1.380.000 | |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan Sewa gedung/Rehabilitasi | 1Dokumen | 16.556.352 | Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah laporan Sewa gedung/Rehabilitasi | 1 Dokumen | 16.556.352 | |
| A | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan | | 237.817.751 | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan | | 237.817.751 | |
| 1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayahnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayahnya | 3 Laporan | 237.817.751 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayahnya | 3 Laporan | 237.817.751 | |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 43.695.000 | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 43.695.000 | |
| A | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | 43.695.000 | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | 43.695.000 | |
| 1 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 10 Orang | 103.455.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 10 Orang | 103.455.000 | |
| V | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | 35.363.180 | | PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | 35.363.180 | |
| A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 35.363.180 | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 35.363.180 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------|------------|--------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| 1 | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif | 3 Dokumen | 6.622.000 | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif | 3 Dokumen | 6.622.000 | |
| 2 | Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya | 3 Laporan | 28.741.180 | Kab.kep anambas jebat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya | 3 Laporan | 28.741.180 | |

CAMAT JEMAJA BARAT,



ABDULLAH SANI,S.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19710810 199404 1 001

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat dilakukan dengan penelaahan kebijakan nasional yang disesuaikan dari visi-misi presiden dan wakil presiden, dimana visi misi sesuai dengan RPJPN 2021-2026, adalah; Visi:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong”.

Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Kebijakan Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029.

Adapun tema Pembangunan Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025 adalah **”Peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dan menjunjung nilai-nilai budaya melayu dan nasional”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut;

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan infrastruktur wilayah.
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor -faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, serta rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025-2029. Adapun rancangan tema pembangunan Prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2025 adalah “Pemulihan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur”, dengan Rancangan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi yang berbasis sektor unggulan.
2. Peningkatan kesejahteraan sosial dan SDM unggul yang berakhlakul karimah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas.
4. Birokraksi yang melayani dan inovatif, serta otonomi desa yang berdaya saing.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jemaja Barat Perkiraan Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Table 3.3 berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS
TAHUN 2025**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA BARAT

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Rencana Perubahan Tahun 2025 | |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Kinerja | Dana/Pagu Indikatif |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7.01. | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 2.936.048.862 | | | 2.724.373.495 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.936.048.862 | | | 2.724.373.495 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 9.449.000 | | | 9.449.000 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 1.380.000 | DAU | 1 Dokumen | 1.380.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 1.035.000 | DAU | 1 Dokumen | 1.035.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 1.380.000 | DAU | 1 Dokumen | 1.380.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 828.000 | DAU | 1 Dokumen | 828.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 966.000 | DAU | 1 Dokumen | 966.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 1.380.000 | DAU | 1 Laporan | 1.380.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 2.480.000 | | 1 laporan | 2.480.000 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.913.290.637 | | | 1.699.425.166 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 10 Orang | 1.814.742.237 | DAU | 10 Orang | 1.600.876.766 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Dokumen | 96.000.000 | DAU | 12 Dokumen | 96.000.000 | |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 1.336.000 | DAU | 1 Laporan | 1.336.000 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bu Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 1.212.400 | DAU | 12 Laporan | 1.212.400 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | | | | 25.000.000 |
| 7.01.01.2.05.00022 | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atributnya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atributnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 25 Orang | 25.000.000 | DAU | | 25 Orang | 25.000.000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 223.691.039 | | | | 223.691.039 |
| 7.01.01.2.06.01 | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Paket | 1006.000 | DAU | | 1 Paket | 1.006.000 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik | Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat | 1 Paket | 2.018.000 | Dau | | 1 Paket | 2.018.000 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 10 Paket | 9.810.959 | DAU | | 10 Paket | 9.810.959 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Paket | 20.456.089 | DAU | | 12 Paket | 20.456.089 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 4 Paket | 4.704.000 | DAU | | 4 Paket | 4.704.000 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 41.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 41.000.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 146.714.000 | DAU | | 12 Laporan | 146.714.000 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 32.625.865 | | | | 32.625.865 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 3 Unit | 32.625.865 | DAU | | 3 Unit | 32.625.865 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 426.398.832 | | | | | 426.398.832 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 29.427.500 | DAU | | 12 Laporan | 29.427.500 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 394.953.332 | DAU | | 12 Laporan | 394.953.332 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 21.978.086 | | | | 21.978.086 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 8 Unit | 6.456.506 | DAU | | 8 Unit | 6.456.506 |
| 7.01.01.2.09.08 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya | Jumlah Laporan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Unit | 15.521.580 | DAU | | 1 Unit | 15.521.580 |
| 7.01.01.2.03 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | 2.615.000 | | | | 2.615.000 |
| 7.01.01.2.03.0005 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 1.235.000 | DAU | | 12 Laporan | 1.235.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----|--|-----------|----------------------|
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 3 Laporan | 1.380.000 | DAU | | 3 Laporan | 1.380.000 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | 43.314.000 | | | | 43.314.000 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 43.314.000 | | | | 43.314.000 |
| 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 10 Orang | 43.314.000 | DAU | | 10 Orang | 43.314.000 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 52.355.615 | | | | 52.355.615 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 52.355.615 | | | | 52.355.615 |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 11.971.000 | DAU | | 1 Dokumen | 11.971.000 |
| 7.01.01.2.03.0005 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 40.384.615 | | | | 40.384.615 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 187.520.703 | | | | 187.520.862 |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan | Jumlah Lapoaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 3 Laporan | 187.520.703 | DAU | | 3 Laporan | 187.520.862 |
| TOTAL | | | | | 2.936.048.862 | | | | 2.724.373.495 |

CAMAT JEMAJA BARAT,



ABDULLAH SANI, S.Pd
PENATA TK.1
NIP. 197108101994041001

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEMAJA BARAT TAHUN 2025

Rumusan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Table 4.1 berikut :

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA BARAT TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA BARAT

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-----------------|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Kinerja | Dana/Pagu Indikatif |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7.01. | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 2.936.048.862 | | | 2.724.373.495 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.936.048.862 | | | 2.724.373.495 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 9.449.000 | | | 9.449.000 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 1.380.000 | DAU | | 3 Dokumen 1.380.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Kepulauan A Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 3 Dokumen | 1.035.000 | DAU | | 3 Dokumen 1.035.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 1.380.000 | DAU | | 1 Dokumen 1.380.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 828.000 | DAU | | 1 Dokumen 828.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 966.000 | DAU | | 1 Dokumen 966.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 1.380.000 | DAU | | 1 Dokumen 1.380.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 2.480.000 | DAU | | 1 Laporan 2.480.000 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.913.290.63 | | | 1.699.425.166 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 17 Orang | 1.814.742.237 | DAU | | 17 Orang 1.600.876.766 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Dokumen | 96.000.000 | DAU | | 12 Dokumen 96.000.000 | |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 1.336.000 | DAU | | 1 Laporan 1.336.000 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 1.212.400 | DAU | | 12 Laporan 1.212.400 | |

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------------------|-----|--|------------|--------------------|
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | | | | 25.000.000 |
| 7.01.01.2.05.00022 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 25.000.000 | DAU | | 1 Laporan | 19,800,000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 223.691.039 | | | | 223.691.039 |
| 7.01.01.2.06.0 | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Paket | 1.006.000 | DAU | | 1 Paket | 1.006.000 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Paket | 2.018.000 | DAU | | 1 Paket | 2.018.000 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 10 Paket | 9.810.959 | DAU | | 8 Paket | 9.810.959 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Paket | 20.456.089 | DAU | | 5 Paket | 20.456.089 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 4Paket | 4.714.000 | DAU | | 5 Paket | 4.714.000 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 41.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 41,050,000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 laporan | 146.714.000 | DAU | | 12 Laporan | 146.714.000 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 32.625.865 | | | | 32.625.865 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 3 Unit | 32.625.865 | DAU | | 3 Unit | 32.625.865 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 426.398.832 | | | | 426.398.832 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 29.427.500 | DAU | | 12 Laporan | 29.427.500 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 12 Laporan | 394.953.332 | DAU | | 12 Laporan | 394.953.332 |
| 7.01.01.2.03 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 21.978.086 | | | | 21.978.086 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 8 Unit | 6.456.506 | DAU | | 2 Unit | 6.456.506 |
| 7.01.01.2.09.08 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya | Ju Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya mlah Laporan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Unit | 15.521.580 | DAU | | 12 Unit | 15.521.580 |
| 7.01.01.2.03 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Persentase Koordinasi Administrasi Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | 2.615.000 | | | | 2.615.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------|--|-----------|----------------------|
| 7.01.01.2.03.0005 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD | Jumla Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD h Laporan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Laporan | 1.235.000 | DAU | | | 1.235.000 |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang milik daerah | Juml Penatausahaan Barang milik daerah ah Laporan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 3 Laporan | 1.380.000 | DAU | | 3 Laporan | 50,000,000 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | 43.314.000 | | | | 43.314.000 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 43.314.000 | | | | 43.314.000 |
| 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 100 Orang | 43.314.000 | DAU | | 10 Orang | 43.314.000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 187.520.703 | | | | 187.520.703 |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan | Jum Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan lah Laporan | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | | 187.520.703 | DAU | | | 187.520.703 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | | | | | | 187.520.703 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 52.355.615 | | | | 52.355.615 |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | 1 Dokumen | 11.971.000 | DAU | | 1 Dokumen | 11.971.000 |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat | Laporan | 40.384.615 | DAU | | Laporang | 40.384.615 |
| TOTAL | | | | | 2.936.048.862 | | | | 2.724.373.495 |

CAMAT JEMAJA BARAT,



ABDULLAH SANI, S.Pd
PENATA TK. 1
NIP. 197108101994041001

BAB V PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Jemaja Barat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
4. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan feedback yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Jemaja Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga rencana kerja RKPD tahun anggaran 2025 dapat tersusun. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.**

Ditetapkan di : Impol
Pada tanggal : 10 Maret 2025

CAMAT JEMAJA BARAT



ABDULLAH SANI, S.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19710810 199404 1 001